PROSES SENGKETA ANTROPOLOGI HUKUM DALAM PANDANGAN ANTROPOLOGI HUKUM PARA AHLI

VICKI SEPTIADI

Email : vickiseptiadi@gmail.com

No BP: 2010003600443

UNIVERSITAS EKASAKTI PADANG

A. PENDAHULUAN

Antropologi hukum adalah kajian antropologis terhadap makna sosial dari dan pentingnya hukum dengan menelaah bagaimana hukum dibuat termasuk bagaimana konteks sosial pembuatan hukum tersebut, bagaimana hukum mempertahankan dan mengubah institusi sosial lainnya, dan bagaimana hukum membagun perilaku sosial. Namun seiring perkembangan zaman dan tatanan politik dunia pasca perang dingin, cakupan kajian antropologi hukum meluas di antaranya membahas keterkaitan antara konflik sosial dengan kesenjangan ekonomi dan batasan hukum dalam melakukan rekayasa sosial.

Antropologi hukum kini turut mengkaji hubungan antara politik dan hukum yang juga berubah dalam konteks pasca – perang dingin tersebut. sebagai akibat dari perluasan cakupan tersebut, bahkan ada kalangan yang menyebut kajian antropologi hukum pada abad ke 19 sebagai kajian antropologi protoleka.

Pengertian lain tentang hukum yaitu bahwa hukum diartikan sebagai proses pemerintahan. Proses pemerintahan itu mencakup peraturan, pemerintahan dalam artian sempit, penanggulangan serta peradilan. Hukum diartikan pula sebagai jalinan nilai. Nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk. Hukum diartikan sebagai nilai yang merupakan salah satu unsur pandangan manusia mengenai hal-hal yang seharusnya dianuti karena dianggap baik, dan hal-hal yang seharusnya dihindari karena dianggap buruk.

Sengketa merupakan permasalahan peradilan yang harus diselesaikan. Menurut R Subekti dan R Tjitrosedibio, Jadi Proses Sengketa Antropologi Hukum

adalah rangkaian kegiatan pengumpulan, penataan, pengolahan dan penganalisisan data/fakta (berproses) terhadap suatu sengketa sehingga diperoleh hasil penyelesaian terhadap perkara tersebut. Peradilan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas negara untuk memegakan hukum dan keadilan. Umumnya seseorang mendapat keadilan melalui pengadilan yang mendapat naungan dari Mahkamah Agung. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum bahwa pengadilan adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan tetapi itu juga harus mewujudkan kepastian hukum sebagai nilai yang terkandung dalam peraturan hukum.

Berdasarkan pemahaman diatas, pengadilan masih dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa dan ini diterapkan untuk warga negara mempermudah akses to justice. Permasalahan ini telah diatur oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kenyataannya, mediasi di pengadilan belum efektif.

Realitanya, banyak persoalan sengketa yang tidak terdaftar dalam pengadilan, itupun diatasi dengan budaya hukum. Budaya tersebut diselidiki melalui model antropologi hukum. Menurut Nader dan Todd, model tersebut membagi tiga tahap proses sengketa yaitu tahap pra-konflik, tahap konflik dan tahap sengketa. Budaya hukum juga memiliki prinsip yaitu ide, sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum. Disinilah, Nader dan Todd membagi tujuh cara penyelesaian sengketa yaitu lumping it (membiarkan saja), avoidance (mengelak), coercion (paksaan), negotiation (perundingan), mediation, arbitration, dan adjudication (peradilan) (Siregar, 2012)

Model antropologi hukum telah diterapkan dalam dua kasus, contohnya diambil dari artikel jurnal BioKultur yang lokasi sengketanya berada di Desa Adat Tengger dan di Kawasan Sungai Brantas Daerah Kabupaten Kediri. Sengketa yang terjadi di Desa Adat Tengger mengenai pemanfaatan hutan konservasi, yang menimbulkan konflik agraria dengan polisi hutan. Secara konflik struktural, antropologi hukum melihat bahwa sengketa tersebut terjadi karena kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat. Setelah ditelusuri secara historis, konflik tersebut merupakan warisan dari kebijakan masa lalu yang belum ditangani serius oleh pemerintah produk reformasi. Ini menjadikan rakyat korban konflik/sengketa terus menerus dilanda konflik agraria tanpa adanya penyelesaian,

dikarenakan kebijakan pemerintah dan pihak pemilik hutan tidak menempatkan rasa kemanusiaan dan keadilan sosial terhadap masyarakat sekitar (Kinasih, 2016).

B. PEMBAHASAN

Pengkajian Antropologi Hukum telah memberikan telaah akan hasil kreasi, distribusi dan transmisi hukum yang ada. Kajian mengenai bagaimana kekuasaan hukum berproses dan memberi dampak dalam masing-masing masyarakat. Selanjutnya akan menampilkan bagaimana feed back dan pengaruh masyarakat-masyarakat terhadap kekuasaan hukum tersebut. Kemajemukan hukum yang ada di Indonesia dewasa ini merupakan soal tersendiri mengingat otetisitas Antropologi Hukum yang sejak lama menempatkan dan menghargai the other laws secara proporsional dan kontekstual.

Dengan demikian para pengkaji antropologi hukum ditantang untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan korelasi positif the other laws dengan state laws. Dalam perspektif antropologi hukum, hukum lahir dari kebudayaan. Melihat hal tersebut di atas tentunya menyadarkan kepada kita akan peran Antropologi Hukum sebagai sebuah perspektif untuk melihat berbagai macam corak hukum yang lahir dan berkembang pula dari berbagai corak dan ragam kebudayaan. Mempelajari Antropologi Hukum berarti kita melihat sebuah realitas, kenyataan atas kehidupan hukum yang sesungguhnya berjalan di masyarakat.

Satu hal yang dapat kita ambil dari antropologi hukum, adalah diharapkan dapat memunculkan kesadaran atas kenyataan adanya keberagaman hukum karena beragamnya budaya. Beragamnya hukum tersebut jangan dimaknakan sebagai pertentangan hukum (conflict of laws), tetapi patut dianggap sebagai khazanah kekayaan hukum yang akan mampu memperkuat serta memperbaharui hukum nasional. Di sisi lain akibatnya adalah memunculkan sikap toleransi untuk menghargai umat manusia yang beragam pola pikir, karakter, pemahaman, dan tentunya juga beragam hukum.

Pada hakekatnya Proses Sengketa Antropologi Hukum adalah suatu rangkaian proses yang dilakukan untuk mendapatkan penyelesaian suatu sengketa. Proses penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan)

dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remedium) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil. Jadi Proses Sengketa Antropologi Hukum adalah rangkaian kegiatan pengumpulan, penataan, pengolahan dan penganalisisan data/fakta (berproses) terhadap suatu sengketa sehingga diperoleh hasil penyelesaian terhadap perkara tersebut. Model-model penyelesaian sengketa (modes of settlement) yang lajim digunakan adalah (Nader dan Todd, 1978: x) arbitrase, negosiasi, mediasi, judikasi, paksaan (coercion), dan penghindaran (avoidance).

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua.

Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak (Nurnaningsih Amriani, 2012: 12). Menurut Nurnaningsih Amriani (2012: 13), yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi (2011: 1) yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain :

- a. Teori hubungan masyarakat Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat (Takdir Rahmadi, 2011: 8).
- b. Teori negosiasi prinsip Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap (Takdir Rahmadi, 2011: 8).
- c. Teori identitas Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak (Takdir Rahmadi, 2011: 9).
- d. Teori kesalahpahaman antar budaya Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihaklain (Takdir Rahmadi, 2011: 9).
- e. Teori transformasi Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat

dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing (Takdir Rahmadi, 2011: 9).

- f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/ terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (substantive) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, 20 sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (psychological) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati (Takdir Rahmadi, 2011: 10).

Proses Sengketa cara Non Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Akhir- akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung (Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008: 1).

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu:

1. Konsultasi: suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan. Ini merupakan salah satu metode non litigasi dimana seorang klien (pihak yang bersengketa) mendatangi dan meminta pendapatnya atas masalah yang dihadapi. Saat ini konsultan memberikan

pendapatnya sesuai dengan kebutuhan serta keperluan kliennya. Konsultasi ini bersifat personal.

2. **Negosiasi:** penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis. Cara ini tidak memerlukan ahli atau konsultan untuk menengahi sengketa yang dihadapi. Para pihak yang bersengketa bertemu untuk mencapai titik terang penyelesaian masalah. Perundingan ini akan menghasilkan kesepakatan bersama atas dasar yang lebih harmonis dan kreatif.
3. **Mediasi:** penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator. Cara penyelesaian sengketa lainnya dalam proses non litigasi. Proses mediasi sendiri hampir sama dengan negosiasi yaitu sama- sama melakukan perundingan. Bedanya proses mediasi menggunakan bantuan seorang mediator dalam proses perundingan dari pihak-pihak yang terkait.
4. **konsiliasi:** penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara parapihak. Sejatinya para pihak yang bersengketa yang menggunakan metode non litigasi melakukan perundingan satu sama lain. Jika menggunakan metode konsiliasi, akan ada seorang penengah yang disebut konsiliator. Pihak ini akan mengusahakan penyelesaian dari sengketa yang dihadapi.
5. **Penilaian Ahli:** pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Proses ini merupakan suatu metode non litigasi dimana para pihak bersengketa menanyakan atau meminta pendapat para ahli yang berkompeten sesuai keahliannya.

Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Contohnya mediasi. Dari pasal tersebut kita ketahui bahwa mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengenal adanya cara arbitrase yaitu penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak

yang bersengketa.

Proses Penyelesaian Sengketa Cara Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution (Nurnaningsih Amriani, 2012: 35).

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang 21 disebut dengan “Alternative Dispute Resolution” atau ADR (Yahya Harahap, 2008: 234).

Litigasi sendiri merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Dalam UUD 1945 pasal 22 disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Badan-badan peradilan tersebut antara lain peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer dan mahkamah konstitusi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ada bermacam-macam jenisnya. Jenis kasus litigasi seperti:

1. Mengenai pembebasan lahan
2. Perbankan
3. Sengketa keperdataan

4. Kejahatan perusahaan (fraud)
5. Penyelesaian atas tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak (difasilitasi oleh pengadilan agama)

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi seringkali disebut dengan ultimum remedium. Jadi maksudnya, litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut.

Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi

Bersengketa dengan pihak lain bukanlah keadaan yang menguntungkan. Banyak yang harus dikorbankan termasuk waktu dan uang. Sebelum beralih ke penyelesaiannya sebenarnya apa itu sengketa? Istilah sengketa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu situasi dimana ada suatu hal yang menyebabkan perselisihan. Bisa dalam bentuk perselisihan kecil ataupun perselisihan besar. Pihak yang tidak puas atas perselisihan tersebut bisa melakukan perundingan untuk menemukan penyelesaian.

Penyelesaian yang ditawarkan diatur dalam UU No 30 Tahun 1999 pasal 1 ayat 10. Dalam Undang-Undang mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengindikasikan bahwa sengketa bisa saja diselesaikan melalui jalur peradilan atau jalur peradilan alternatif (litigasi atau non litigasi). Alternatif ini banyak diberikan terutama pada sengketa yang masuk ke dalam kasus perdata.

Seperti yang diketahui proses litigasi berarti membawa permasalahan sengketa ke jalur hukum sedangkan proses non litigasi penyelesaiannya berdasarkan itikad baik yang dimiliki para pihak yang bersengketa. penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan sesuai kesepakatan bersama dan tertulis dalam sebuah perjanjian inilah yang disebut juga sebagai arbitrase.

Definisi sengketa menurut Nader dan Todd

Keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di muka atau dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan istilah prakonflik dan konflik. Prakonflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik itu sendiri adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.

Pola penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk atau kerangka untuk mengakhiri suatu pertingkaian atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa melalui jalur pengadilan. Untuk mendapat hasil yang bersifat final dan mengikat adakalanya apabila sengketa dalam kontrak pemborongan penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme pengadilan perdata. Adapun keuntungan apabila sengketa kontrak pemborongan diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) adalah :

1. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketenteraman sosial.
2. Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah dalam posisi pihak lawan
3. Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan.
4. Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi
5. Dalam sistem litigasi, para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Dengan demikian, dapat dikatakan apabila para pihak mengambil langkah litigasi untuk menyelesaikan sengketa kontrak pemborongan, tidak hanya dapat menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga dapat menjamin suatu bentuk ketertiban umum, yang tertuang dalam Undang-undang secara eksplisit maupun implisit. Kendatipun demikian apabila para pihak hanya mengandalkan upaya litigasi untuk memecahkan persoalan kontrak pemborongan yang pada umumnya melibatkan pihak pemerintah dengan pihak swasta maka adakalanya

kedua belah pihak mengalami kerugian. Hal ini banyak ditemukan kekurangan pada proses litigasi yang terjadi di Indonesia, diantaranya :

1. Memaksa para pihak pada posisi ekstrem
2. Memerlukan pembelaan (advokasi) atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi putusan
3. Benar-benar mengangkat persoalan dalam suatu perkara, baik persoalan materi (substansif) atau prosedur untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta yang ekstrem dan sering kali marginal
4. Menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan
5. Fakta-fakta yang dapat dibuktikan membentuk kerangka persoalan, para pihak tidak selalu mampu mengungkapkan kekhawatiran mereka yang sebenarnya
6. .Tidak mengupayakan untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan para pihak yang bersengketa
7. Tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisenteris yaitu sengketa yang melibatkan banyak pihak, banyak persoalan dan beberapa kemungkinan alternatif penyelesaian

C. PENUTUP

Sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

Jadi Proses Sengketa Antropologi Hukum adalah rangkaian kegiatan pengumpulan, penataan, pengolahan dan penganalisisan data/fakta (berproses) terhadap suatu sengketa sehingga diperoleh hasil penyelesaian terhadap perkara tersebut.

Proses sengketa yang dapat ditempuh oleh orang maupun golongan yang bersengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Litigasi

Yang mana suatu proses menyelesaikan suatu sengketa secara hukum atau melalui jalur pengadilan

2. Non Litigasi

Yang mana proses menyelesaikan sengketa nya dilakukan dengan :

1. Konsultasi
2. Negosiasi
3. Mediasi
4. Konsolidasi
5. Penilaian Ahli

Nader dan Todd membagi tujuh cara penyelesaian sengketa yaitu ;

1. lumping it (membiarkan saja),
2. avoidance (mengelak),
3. coercion (paksaan),
4. negotiation (perundingan),
5. mediation,
6. arbitration, dan
7. adjudication (peradilan)

DAFTAR PUSTAKA

Amarini, Indriati. 2016. *Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan*. Diambil dari <http://jurnalnasional.ump.ac.id>.

Kinasih, Sri E. 2016. *Penyelesaian Konflik dalam Pemanfaatan Hutan Konservasi pada Masyarakat Adat di Jawa Timur*. Jurnal BioKultur Vol. 5 (1) hal. 75 – 96. Diambil

dari <http://journal.unair.ac.id/BK@penyelesaian-konflik-dalam-pemanfaatan-hutan-konservasi-article-10983-media-133-category-8.html>.

PDP PPZ. 2016. *BAB II Tinjauan Pustaka*. Diambil dari <http://repository.unpas.ac.id>.

Siregar, Gabriel V A. 2012. *Sengketa Penambang Pasir Mekanik Sungai Brantas: Studi Kasus Sengketa Aktivitas Penambangan Pasir Mekanik di Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri*. Jurnal BioKultur Vol. 1 (2) hal. 179-198. Diambil

dari <http://journal.unair.ac.id/BK@sengketa-penambang-pasir-mekanik-sungai-brantas:-studi-kasus-sengketa->

<https://core.ac.uk/reader/289799250>

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiniIeQu_3uAhWR4HMBHe6DCuAQFjAJegQIBBAD&url=https%3A%2F

[%2Fprints.uny.ac.id%2F22029%2F4%2F4.BAB%2520II.pdf&usg=AOvVaw1uYFylilfbttEx7UXlxZPO](https://prints.uny.ac.id%2F22029%2F4%2F4.BAB%2520II.pdf&usg=AOvVaw1uYFylilfbttEx7UXlxZPO)

<https://www.dslalawfirm.com/litigasi/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa

<http://www.bahasahukum.net/2018/10/16/penyelesaian-sengketa-dengan-model-antropologi-hukum>

<https://www.jasahukumbali.com/artikel/penyelesaian-sengketa-dalam-amandemen-atau-addendum>